



Kader Posyandu Sebagai Aset Pertahanan Negara dalam Penanggulangan Ancaman Stunting

Muhammad Novrianto^{1*}, Ari Pitoyo Sumarno², Edy Saptono³

^{1,2,3} Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mnovrianto7@email.com

Abstract. *Stunting in Indonesia presently constitutes a strategic threat that may undermine the nation's people resources and national resilience. Posyandu cadres operate at the forefront and fulfill a vital function. They frequently encounter structural impediments that hinder their proper functioning. This study seeks to examine the function of Posyandu cadres through the lens of a national defense paradigm, aiming to clarify conceptual discrepancies in the current literature. The research employed a systematic literature review to evaluate and integrate results from many pertinent scholarly journals. The investigation verified that the acknowledged function of cadres is ineffective due to ongoing structural problems, including capacity deficiencies and insufficient incentives. Significantly, it was discovered that there was no discourse connecting the role of cadres to the notion of national defense, highlighting a deficiency in coherence within academic research. This paper presents a novel conceptual framework characterizing cadres as "human security agents." This indicates a transition in policy focus from social programs to strategic expenditures in non-military security infrastructure.*

Keywords: *Empowerment; Human Security; National Defense; Posyandu Cadres; Stunting.*

Abstrak. Stunting di Indonesia saat ini menjadi bagian dari ancaman strategis yang dapat mengancam sumber daya manusia dan ketahanan nasional negara. Kader Posyandu bertugas di garis depan dan memiliki peran penting. Mereka sering menghadapi hambatan struktural yang membuat mereka tidak berfungsi dengan baik. Dengan menganalisis peran kader Posyandu menggunakan paradigma pertahanan negara, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi variasi konseptual dalam literatur yang ada. Studi ini menggunakan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis dan mensintesis hasil dari berbagai artikel ilmiah yang relevan. Hasil analisis mengkonfirmasi bahwa peran kader yang telah diakui masih kurang efektif karena masalah struktural yang berkelanjutan seperti kekurangan kapasitas dan kurangnya insentif. Lebih penting lagi, telah ditemukan bahwa tidak ada percakapan yang mengaitkan peran kader dengan konsep pertahanan negara, yang menunjukkan bahwa penelitian akademis tidak sejalan. Penemuan baru dalam penelitian ini adalah kerangka konseptual baru yang menggambarkan kader sebagai "agen keamanan manusia". Ini menunjukkan bahwa perspektif kebijakan telah berubah, beralih dari program sosial ke investasi strategis dalam infrastruktur pertahanan non-militer.

Kata kunci: Kader Posyandu; Keamanan Manusia; Pemberdayaan; Pertahanan Negara; Stunting.

1. LATAR BELAKANG

Paradigma tentang pertahanan negara telah berevolusi. Kekuatan sebuah bangsa tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuan militer, tetapi justru bertumpu pada kekuatan dan kualitas modal manusia (human capital) yang dimilikinya (Arfiyanti & Ariyanti, 2022). Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan fondasi esensial bagi ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, setiap ancaman terhadap pembangunan modal manusia secara inheren merupakan ancaman bagi keamanan dan pertahanan negara.

Salah satu ancaman senyap (silent threat) namun paling signifikan terhadap kualitas modal manusia di Indonesia adalah tingginya prevalensi stunting. Stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak balita, bukan sekadar isu kesehatan publik, melainkan krisis multidimensional dengan dampak jangka panjang yang bersifat permanen. Kondisi ini secara langsung mengganggu perkembangan kognitif, menurunkan

tingkat kecerdasan, dan meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit (Sekarini, Pratiwi, & Armini, 2022). Dalam skala makro, stunting akan menghasilkan angkatan kerja masa depan yang kurang produktif, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing bangsa. Dengan angka stunting di Indonesia yang masih berada pada level 21,6% pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan, 2023), isu ini telah menjadi persoalan strategis nasional yang menuntut penanganan dari berbagai perspektif, termasuk perspektif pertahanan.

Dalam upaya menanggulangi stunting, pemerintah memiliki infrastruktur sosial yang telah mengakar kuat di tingkat komunitas, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), Posyandu menjadi instrumen kebijakan vital untuk menjangkau sasaran utama: ibu hamil dan balita (Nugraheni & Malik, 2023). Ujung tombak dari pelaksanaan Posyandu adalah para kader, yakni relawan komunitas yang memegang peran strategis. Mereka menjalankan fungsi multifaset sebagai penyuluh, motivator, dan penggerak sosial di lingkungannya (Haura, Alifia, & Wibowo, 2025). Kedekatan mereka dengan masyarakat menjadikan posisi kader sangat krusial dalam keberhasilan program pencegahan stunting.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara peran ideal kader yang strategis dengan realitas kinerja mereka di lapangan. Efektivitas peran kader Posyandu dalam menanggulangi stunting kerap kali tidak optimal karena terhambat oleh serangkaian tantangan yang kompleks dan saling terkait. Hambatan utama bersumber dari keterbatasan kapasitas internal kader itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan mendalam tentang gizi spesifik, rendahnya keterampilan penyuluhan yang persuasif, hingga kesulitan teknis dalam melakukan pengukuran antropometri dan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) secara akurat (Nurbaya, Saeni, & Irwan, 2022; Rejeki, & Mahendra, 2023). Kendala ini diperparah oleh permasalahan sistemik dan institusional, di mana status kader sebagai tenaga sukarela tanpa insentif yang memadai seringkali berujung pada rendahnya motivasi dan tingginya angka kader tidak aktif (Nugraheni & Malik, 2023). Di sisi lain, tantangan eksternal berupa faktor sosio-kultural seperti rendahnya partisipasi aktif masyarakat, kuatnya mitos seputar pola asuh, serta resistensi terhadap perubahan perilaku menjadi persoalan sehari-hari yang harus dihadapi kader (Priharwanti & Amalia, 2022). Akumulasi dari berbagai tantangan ini menciptakan sebuah "bottleneck" kritis yang memperlambat laju penurunan angka stunting dan, pada akhirnya, berpotensi melemahkan fondasi pertahanan negara di masa depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran kader Posyandu dalam penanggulangan stunting dan merumuskan sebuah model pemberdayaan yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kinerja

mereka. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif peran dan praktik kader Posyandu; (2) mengidentifikasi dan menganalisis hambatan utama (kapasitas, sistemik, dan sosio-kultural) yang mereka hadapi; (3) mengembangkan kerangka konseptual baru yang memposisikan kader sebagai "agen keamanan manusia" (human security agent); dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk penguatan peran kader.

Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah mendeskripsikan peran kader Posyandu sebagai motivator, administrator, dan edukator (Rejeki & Mahendra, 2023; Haura et al., 2025). Studi-studi ini telah memberikan fondasi penting dalam memahami "apa" peran kader dan "apa saja" masalahnya. Namun, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan. Pertama, secara konseptual, mayoritas penelitian membingkai peran kader murni dalam domain kesehatan masyarakat (public health). Terdapat kekosongan literatur yang secara eksplisit mengintegrasikan fungsi kader ke dalam kerangka teoretis keamanan manusia dan pertahanan negara. Kedua, secara solutif, banyak penelitian yang hanya memberikan rekomendasi parsial seperti "perlunya peningkatan pelatihan", namun belum menawarkan sebuah model pemberdayaan holistik yang menjawab akar masalah motivasi dan keberlanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan merekonseptualisasi peran kader Posyandu dari sekadar tenaga kesehatan komunitas menjadi aset strategis dalam arsitektur pertahanan negara non-militer. Konsep "agen keamanan manusia" diajukan sebagai paradigma baru untuk memberdayakan mereka. Justifikasi penelitian ini terletak pada urgensinya secara teoretis, praktis, dan sosial. Secara teoretis, penelitian ini akan menjembatani diskursus antara studi kebijakan kesehatan, administrasi publik, dan studi keamanan. Secara praktis, temuannya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based) yang dapat diterapkan di berbagai level pemerintahan. Pada akhirnya, dengan mengoptimalkan peran garda terdepan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan penurunan stunting, sebuah investasi jangka panjang untuk ketahanan nasional Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan kerangka teori bertingkat, yang mencakup Grand Theory, Middle-Range Theory, dan Applied Theory, untuk mengkaji fenomena peran kader Posyandu dalam menangani stunting secara menyeluruh.

Grand Theory: Teori Sistem

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem sebagai kerangka utama (grand theory). Ludwig von Bertalanffy (1968) mempopulerkan teori ini. Teori ini menyatakan bahwa entitas sosial merupakan sistem terbuka yang terdiri dari banyak subsistem yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, program penanggulangan stunting dikaji sebagai suatu sistem yang ekstensif. Pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan kader Posyandu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memengaruhi seberapa baik masing-masing bagian tersebut bekerja.

Metode ini masih sangat penting dalam penelitian kesehatan masyarakat modern, yang kini disebut "Pendekatan Sistem" atau "Pemikiran Sistem" (Raja & van Ginneken, 2024). Metode ini bukan lagi sekadar teori; ini telah menjadi cara yang berguna untuk memetakan masalah kesehatan yang rumit yang memiliki banyak penyebab. Misalnya, penelitian kesehatan masyarakat kontemporer menggunakan instrumen seperti Causal Loop Diagrams (CLDs) untuk menggambarkan interkoneksi di antara berbagai komponen (termasuk kebijakan, perilaku, dan sumber daya) yang berkontribusi pada masalah kesehatan yang rumit, seperti obesitas atau kesehatan mental global (Luna Pinzon et al., 2024; Raja & van Ginneken, 2024).

Dari sudut pandang teoretis ini, kinerja kader (subsistem tunggal) tidak dapat dipahami secara terpisah. Kita perlu melihat bagaimana kinerja mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lain, seperti kebijakan pemerintah pusat, bantuan dari pusat kesehatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Jika satu subsistem lemah, seperti jika kader tidak memiliki cukup pelatihan atau insentif, itu akan membuat sistem pengurangan stunting yang lengkap kurang berhasil.

Teori Jangkauan Menengah: Birokrasi di Tingkat Jalanan

Studi ini menggunakan gagasan Michael Lipsky (1980) tentang Birokrasi Tingkat Jalanan di tingkat jangkauan menengah. Teori ini cukup berguna untuk melihat aspek manajerial dan lini depan dalam penerapan kebijakan. Lipsky (1980) berpendapat bahwa pelaksana kebijakan lini depan, termasuk guru, polisi, dan, dalam hal ini, kader Posyandu, bukan sekadar pelaksana pasif. Mereka bukan penafsir pasif; mereka adalah "penafsir aktif" yang memiliki banyak kebebasan untuk melaksanakan kebijakan.

Banyak penelitian kontemporer telah memvalidasi penerapan teori ini sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan di negara-negara berkembang. Sebuah sintesis meta-etnografi menunjukkan bahwa teori Lipsky berfungsi sebagai "sumber analisis yang ampuh" untuk menjelaskan disparitas antara tujuan kebijakan kesehatan dan implementasi aktual dalam praktik, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) (Mdege dkk., 2014).

Kader posyandu, yang berfungsi sebagai birokrat tingkat jalanan, menavigasi kondisi kerja yang khas yang ditandai dengan tuntutan substansial dari berbagai program (imunisasi, gizi, dan layanan kesehatan ibu dan anak), yang sering kali disertai dengan sumber daya yang tidak memadai (insentif terbatas, peralatan tidak memadai, dan dukungan pengawasan yang tidak memadai). Investigasi empiris terhadap petugas kesehatan masyarakat (CHW) dalam beberapa konteks, termasuk Afrika Selatan, telah menghasilkan hasil yang analog: efisiensi mereka terganggu oleh remunerasi yang tidak memadai, tidak adanya pengakuan formal, dan kemiskinan struktural yang meluas dalam populasi yang mereka layani (George et al., 2021).

Akibatnya, kinerja kader yang dianggap tidak memuaskan dalam literatur tertentu dapat diperiksa bukan sebagai kegagalan yang terisolasi, tetapi sebagai respons adaptif yang logis terhadap kondisi kerja yang menantang dan kekurangan sumber daya, yang merupakan lambang birokrasi tingkat jalanan.

Teori yang Dimanfaatkan: Teori Pemberdayaan Masyarakat

Studi ini menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat sebagai landasan untuk mengembangkan model solusi (teori terapan). Teori ini menekankan mekanisme yang digunakan individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan otonomi atas hidup mereka. Zimmerman (1995) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan konstruksi multidimensi yang mencakup pengembangan keterampilan (tingkat individu), dukungan sosial (tingkat hubungan), dan akses partisipatif (tingkat komunitas).

Kerangka teoritis ini penting dalam ranah intervensi kesehatan. Sebuah tinjauan pustaka sistematis (SLR) yang berfokus pada pencegahan stunting mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang esensial bagi keberhasilan program. Terdapat tiga langkah penting dalam proses ini: meningkatkan kesadaran, membangun kapasitas (melalui pelatihan dan pendidikan), dan membantu masyarakat menjadi mandiri (Hidayat & Sari, 2024).

Akibatnya, gagasan ini mendasari pengembangan model solusi yang melampaui instruksi teknis dasar. Pemberdayaan kader Posyandu bukan sekadar proses transmisi pengetahuan (peningkatan kapasitas individu). Strategi ini harus mencakup pembangunan kelembagaan Posyandu di tingkat komunitas dan penciptaan mekanisme partisipasi yang memberikan kader hak suara dalam perencanaan dan evaluasi program (Rawson dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru tentang pemberdayaan. Penelitian terbaru menggarisbawahi bahwa pemberdayaan sejati terwujud ketika "pengetahuan pengalaman" yang dimiliki komunitas, termasuk kader, dihargai setara dengan pengetahuan profesional (Rawson dkk., 2024). Jadi,

pemberdayaan bukan sekadar memberi seseorang pengetahuan; melainkan tentang memberi mereka kekuatan dan sumber daya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap serangkaian penelitian relevan yang telah ada mengenai peran kader Posyandu, penanggulangan stunting, dan kaitannya dengan gagasan pertahanan negara. Proses ini memungkinkan pemetaan lanskap pengetahuan saat ini, perbandingan berbagai temuan empiris, serta identifikasi kesenjangan konseptual atau teoretis yang menjadi dasar argumen kebaruan (novelty) dalam tulisan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis komparatif terhadap literatur yang telah diseleksi, ditemukan tiga pola tematik utama yang secara konsisten muncul dan merepresentasikan lanskap pengetahuan saat ini.

Validasi Peran Multifaset Kader sebagai Garda Terdepan Pelayanan Primer Literatur yang dianalisis secara serempak mengonfirmasi posisi kader sebagai agen kunci di tingkat komunitas dengan tiga peran utama.

- a) Sebagai edukator, kader bertugas memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi, seperti yang ditunjukkan oleh Haura, Alifia, & Wibowo (2025) serta Nurbaya, Saeni, & Irwan (2022) yang menyoroti pentingnya pengetahuan kader dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
- b) sebagai motivator, kader berperan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Posyandu, sebuah fungsi yang ditegaskan oleh Rejeki & Mahendra (2023) dalam analisis mereka mengenai peran kader dalam memotivasi ibu balita.
- c) sebagai administrator, kader melaksanakan fungsi teknis pelayanan seperti pendaftaran, penimbangan, dan pencatatan, yang merupakan bagian dari sistem lima meja Posyandu (Nugraheni & Malik, 2023). Konsistensi temuan ini di berbagai studi memvalidasi bahwa secara konseptual, peran multifaset kader telah diakui sebagai tulang punggung operasional Posyandu di lapangan.

Identifikasi Hambatan Sistemik dan Kultural yang Bersifat Kronis Meskipun perannya vital, efektivitas kader secara konsisten dilaporkan terhambat oleh serangkaian masalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

- a) Keterbatasan Kapasitas Internal: Studi oleh Rejeki & Mahendra (2023) dan Nugraheni & Malik (2023) secara eksplisit menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan kader tentang gizi dan kesehatan balita membuat mereka tidak percaya diri dan sangat bergantung pada tenaga kesehatan dari Puskesmas. Nurbaya et al. (2022) juga menekankan perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader melalui edukasi dan simulasi.
- b) Kelemahan Institusional: Masalah ini adalah yang paling sering diangkat. Nugraheni & Malik (2023) secara tegas mengidentifikasi kurangnya motivasi kader, kurangnya sarana-prasarana, dan masalah pendanaan sebagai faktor penghambat utama. Status kader yang bersifat sukarela tanpa insentif yang jelas disebut sebagai penyebab labilnya kinerja dan partisipasi mereka.
- c) Tantangan Sosio-kultural: Kader juga menghadapi resistensi dari masyarakat. Priharwanti & Amalia (2022) menyoroti adanya mitos-mitos terkait pola asuh dan kehamilan. Sementara itu, Rejeki & Mahendra (2023) melaporkan rendahnya partisipasi ibu balita karena berbagai alasan seperti kesibukan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kader tidak hanya berjuang dengan keterbatasan internal, tetapi juga dengan faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung mereka.

Absennya Paradigma Pertahanan Negara dalam Diskursus Peran Kader Ini adalah temuan yang paling signifikan dari tinjauan literatur ini.

Dari keseluruhan artikel yang dianalisis, hanya satu studi oleh Arfiyanti & Ariyanti (2022) yang secara eksplisit dan berani mengaitkan upaya pencegahan stunting melalui perbaikan gizi ibu hamil dengan "peningkatan kualitas SDM bagi pertahanan negara". Studi ini menjadi sebuah anomali yang penting. Sebagian besar literatur lain, seperti studi oleh Haura et al. (2025), Rejeki & Mahendra (2023), dan Nugraheni & Malik (2023), secara konsisten membingkai peran kader murni dalam domain kesehatan masyarakat (public health) dan pelayanan sosial. Diskursus yang ada berhenti pada upaya perbaikan gizi balita tanpa mengangkatnya ke level strategis keamanan nasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi kader sebagai aset pertahanan non-militer belum menjadi subjek kajian yang luas di kalangan akademisi.

Pembahasan

Interpretasi Hasil: Dari Masalah Sosial Menuju Kegagalan Desain Kebijakan Temuan mengenai peran multifaset kader dan berbagai hambatanya, jika diinterpretasikan melalui

lensa Teori Sistem, mengarah pada satu kesimpulan kritis: masalah kinerja kader bukanlah sekadar isu sosial atau individu, melainkan manifestasi dari disfungsi dalam sistem yang lebih besar. Kinerja kader (subsistem) yang tidak optimal adalah gejala dari input yang tidak memadai dari subsistem lain, seperti kurangnya dukungan kebijakan dan sumber daya (pemerintah) serta rendahnya partisipasi (masyarakat). Lebih jauh, menggunakan Teori Administrasi Publik, khususnya konsep street-level bureaucracy, kita dapat memahami bahwa status "sukarela" tanpa skema insentif yang jelas merupakan sebuah kelemahan fundamental dalam desain kebijakan. Kinerja yang fluktuatif bukanlah cerminan dari kurangnya niat baik para kader, melainkan respons adaptif terhadap sistem yang tidak memberikan dukungan, pengakuan, dan sumber daya yang memadai.

Rekonseptualisasi Peran Kader sebagai "Agen Keamanan Manusia" Absennya paradigma pertahanan negara dalam literatur membuka ruang untuk sebuah ekspansi teoretis. Penelitian ini mengusulkan sebuah kebaruan dengan membingkai ulang peran kader Posyandu menjadi "agen keamanan manusia" (human security agents). Kerangka ini berargumen bahwa stunting adalah ancaman langsung terhadap keamanan individu (terutama hak untuk berkembang secara optimal), yang pada skala agregat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Dalam paradigma ini, kader yang berada di garis depan, melakukan deteksi dini, dan intervensi gizi, secara de facto sedang menjalankan fungsi pertahanan non-militer. Mereka adalah sensor pertama negara di tingkat akar rumput untuk mendeteksi kerentanan modal manusia.

Implikasi Praktis: Dari Program Bantuan Sosial ke Investasi Infrastruktur Pertahanan Implikasi praktis dari rekonseptualisasi di atas sangatlah signifikan dan dapat dirumuskan melalui Teori Pemberdayaan Komunitas. Jika kader diakui sebagai aset pertahanan, maka program penguatan kapasitas mereka harus dilihat sebagai investasi strategis dalam infrastruktur pertahanan non-militer. Pemberdayaan kader harus melampaui sekadar pelatihan (level individu) dan mencakup: (1) Penguatan Institusional (level relasional/komunitas): Pemerintah pusat dan daerah perlu merancang skema untuk memformalkan status kader, lengkap dengan insentif finansial yang layak dan berkelanjutan. (2) Peningkatan Kapasitas Berstandar: Perlu ada kurikulum standar nasional yang mencakup keterampilan teknis dan soft skills. (3) Integrasi Sistem Informasi: Data yang dikumpulkan kader harus diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah.

Kekurangan dan Tujuan Penelitian Masa Depan Penelitian ini memiliki keterbatasan inheren karena berbasis tinjauan literatur, sehingga tidak menangkap kompleksitas praktik di lapangan. Generalisasi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat konteks lokal yang beragam. Oleh karena itu, penelitian masa depan sangat disarankan untuk: (1) Melakukan studi

etnografi mendalam untuk memvalidasi secara empiris bagaimana konsep "agen keamanan manusia" ini dimanifestasikan dalam praktik sehari-hari kader. (2) Merancang studi intervensi (Randomized Controlled Trial) untuk menguji efektivitas berbagai model insentif terhadap peningkatan kinerja dan motivasi kader secara terukur..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran kader Posyandu dalam penanggulangan stunting memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui domain kesehatan masyarakat konvensional. Berdasarkan tinjauan literatur sistematis, teridentifikasi bahwa meskipun peran multifaset kader telah tervalidasi, efektivitas mereka secara kronis terhambat oleh masalah struktural. Lebih penting lagi, ditemukan adanya kesenjangan konseptual di mana literatur yang ada gagal mengaitkan peran kader dengan paradigma pertahanan negara.

Penelitian ini mengajukan kebaruan teoretis dengan merekonseptualisasi peran kader Posyandu menjadi "agen keamanan manusia". Dalam kerangka ini, upaya kader dalam mencegah stunting diinterpretasikan sebagai tindakan pertahanan non-militer di garis depan yang secara langsung melindungi dan membangun kualitas modal manusia—aset paling vital bagi ketahanan sebuah bangsa. Implikasi dari argumen ini bersifat transformatif, di mana program penguatan kader harus diposisikan sebagai investasi strategis dalam infrastruktur pertahanan negara. Rekomendasi kebijakan mencakup formalisasi status kader, pengembangan skema insentif yang berkelanjutan, dan standarisasi pelatihan. Pada akhirnya, dengan mengoptimalkan peran kader Posyandu, negara tidak hanya memerangi stunting, tetapi juga secara fundamental memperkuat fondasi pertahanan nasionalnya untuk generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Arfiyanti, & Ariyanti, D. (2022). Makanan tambahan ibu hamil untuk mencegah stunting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pertahanan negara. *Jurnal Kimia Saintek dan Pendidikan*, 6(2), 56–65. <https://doi.org/10.51544/kimia.v6i2.3494>
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
- Fitria, D. A. (2023). Peran pemerintah dalam penanganan stunting pada balita di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.160>
- George, A., Scott, K., & Sriram, V. (2021). Building health system trust: A qualitative study of community health workers' efforts in marginalised communities in South Africa. *BMJ Open*, 11(5), e044065. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044065>
- Haura, M., Alifia, D., & Wibowo, S. (2025). Urgensi peran kader dalam pencegahan stunting di posyandu. *Jurnal Kajian Praxis Pendidikan Masyarakat Indonesia*, 1(1), 28–32.

- Hidayat, T., & Sari, D. K. (2024). Systematic literature review on community empowerment in preventing stunting in children: Challenges and impacts. *Jurnal Edukasi dan Manajemen Riset (JEMR)*, 4(2).
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.2307/1288305>
- Luna Pinzon, A., Gijzen, R., Savona, N., Emke, H., & Gevers, D. W. (2024). Systems approaches in public health: Beyond mapping the causes. *Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1007/s10389-024-02263-z>
- Mdege, N., et al. (2014). The use of street-level bureaucracy theory in health policy analysis in low- and middle-income countries: A meta-ethnographic synthesis. *Health Policy and Planning*, 29(Suppl. 3), iii70–iii79. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu091>
- Nugraheni, N., & Malik, A. (2023). Peran kader posyandu dalam mencegah kasus stunting di Kelurahan Ngijo Kota Semarang. *Lifelong Education Journal*, 3(1), 83–92. <https://doi.org/10.59935/lej.v3i1.198>
- Nurbaya, N., Saeni, R. H., & Irwan, Z. (2022). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu melalui kegiatan edukasi dan simulasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(1), 678–686. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6579>
- Priharwanti, A., & Amalia, R. (2022). Peran keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kauman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Abdimayuda: Indonesian Journal of Community Empowerment for Health*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.19184/abdimayuda.v1i1.28918>
- Raja, S., & van Ginneken, N. (2024). Applying systems theory to global mental health. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*, 11, e15. <https://doi.org/10.1017/S205442512400147X>
- Rawson, E., et al. (2024). Strengthening community empowerment initiatives as a route to greater equity: An English case study. *Community Development Journal*. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsae046>
- Rejeki, R. S., & Mahendra, G. K. (2023). Analisis peran kader posyandu dalam pencegahan stunting di Kelurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 121–125. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.202>
- Sekarini, N. N. A. D., Pratiwi, P. I., & Armini, L. N. (2022). Peran orang tua dalam pertumbuhan balita pada masa pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Midwifery*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.35473/ijm.v5i1.1536>
- Tamami, A. H. (2025). *Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kemampuan perencanaan keluarga di Desa Dukuh Mencek* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581–599. <https://doi.org/10.1007/BF02506983>